

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 4.1. Latar Belakang

Tingkat pendidikan yang diterima oleh masyarakat menjadi salah satu yang menjadi penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam suatu wilayah. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa masyarakat tersebut memiliki kualitas hidup yang lebih baik. BPS dalam Istiqomah et al. (2018) menjelaskan pula bahwa tingkat pendidikan pada suatu lingkungan masyarakat dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan pada wilayah tersebut.

Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai agar dapat mencapai potensi terbaik untuk hidup di dunia modern yang kompetitif. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang termuat pada ayat pertama Pasal 28C Undang – Undang (UU) dengan bunyi “Setiap orang mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Berdasarkan UU tersebut, masyarakat memiliki hak untuk belajar dan menggunakan teknologi serta ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

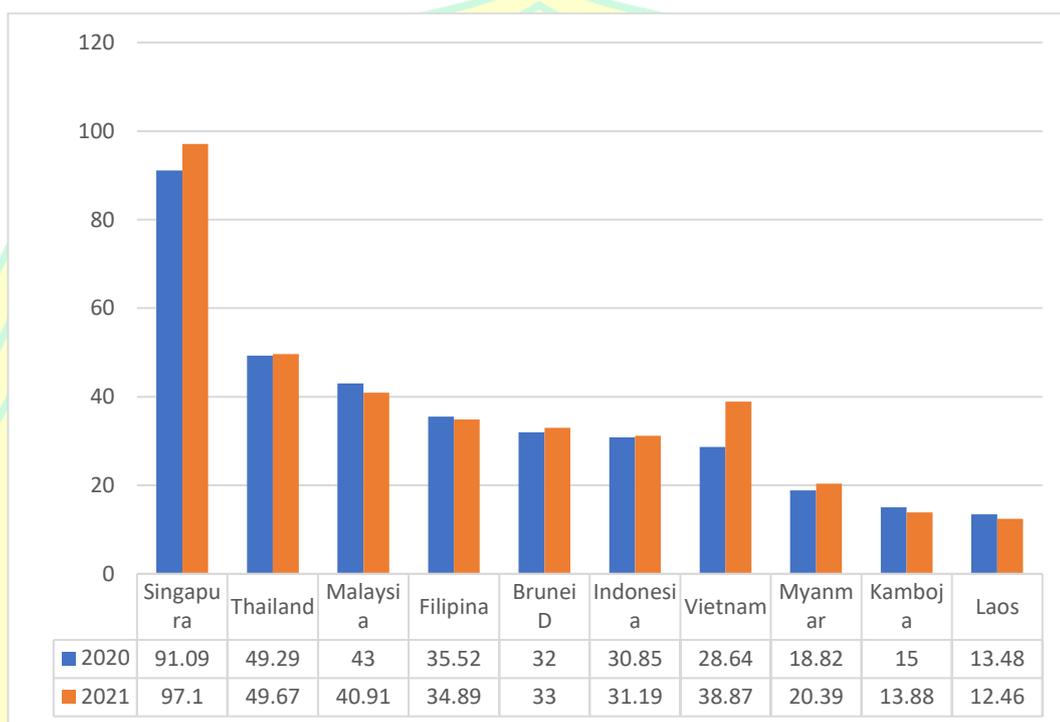
Sementara itu, pada Pasal 31 ayat satu Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 dijelaskan pula bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pengajaran dengan bebas dan dilindungi dari perlakuan yang bersifat diskriminasi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah diwajibkan untuk menyediakan pelayanan, kemudahan, dan jaminan bahwa setiap warga negaranya menerima pendidikan berkualitas tinggi. Hal tersebut juga tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanahkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas, relevansi, keterjangkauan, dan pemerataan sesuai asas keadilan, serta akses berkelanjutan ke pendidikan tinggi. Selanjutnya, Pasal 76 Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemerintah pusat, bersama dengan pemerintah daerah dan atau perguruan tinggi, bertanggung jawab untuk mencukupi hak mahasiswa atau mahasiswi yang tidak memiliki keuangan yang cukup dalam melanjutkan pendidikan mereka sesuai dengan peraturan akademik (Habibah et al., 2019).

Akan tetapi, dalam kenyataannya di Indonesia belum seperti apa yang dituangkan dalam undang – undang (Fatah et al., 2021). Hal ini dapat terlihat berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK), terkhusus pada Perguruan Tinggi (PT), yang masih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan di bawahnya. Fakta bahwa banyaknya warga di suatu negara dalam melanjutkan pendidikan dari jenjang menengah atas dan kejuruan ke pendidikan tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan sistem pendidikan tinggi negara tersebut.

Selain itu, banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan dapat menunjukkan seberapa baik dan sejauh mana pemerintah memberikan pelayanan untuk pemenuhan hak kepada masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan (Habibah et al., 2019). Apabila didefinisikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) atau *Gross Enrollment Rate* (GER) adalah parameter umum digunakan untuk menghitung jumlah penduduk di suatu negara yang melanjutkan pendidikan dalam bentuk persentase. APK pula menjadi salah satu indikator penilaian dalam pendidikan bermutu. Dengan pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap jenjang pendidikan dengan memberikan jaminan bahwa kualitas pendidikan dapat menjadi inklusif dan merata (Naharin et al., 2023). APK PT adalah persentase banyaknya populasi yang masih menempuh pendidikan pada perguruan tinggi tanpa memandang usia dibandingkan dengan populasi berusia 19 hingga 23 tahun.

APK PT dianggap penting untuk diketahui karena pendidikan tinggi menjadi salah satu usaha yang dapat digunakan oleh suatu negara dalam peningkatan mutu SDM yang dimilikinya. Dengan APK PT yang tidak memadai, maka akan sulit untuk meningkatkan daya saing dan persaingan global terhadap negara lain. Menurut Safira & Wibowo (2021), dengan semakin tinggi nilai APK PT, memiliki arti bahwa semakin banyak pula anak usia kuliah yang mengikuti pendidikan tinggi. Apabila nilai APK mendekati atau diatas nilai 100%, hal tersebut dapat menunjukkan pada wilayah tersebut mampu menampung dan memberikan pelayanan terbaik kepada penduduk usia

pada suatu jenjang. Dengan besarnya nilai APK PT pula dapat menunjukkan kemudahan akses yang dirasakan oleh masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi.

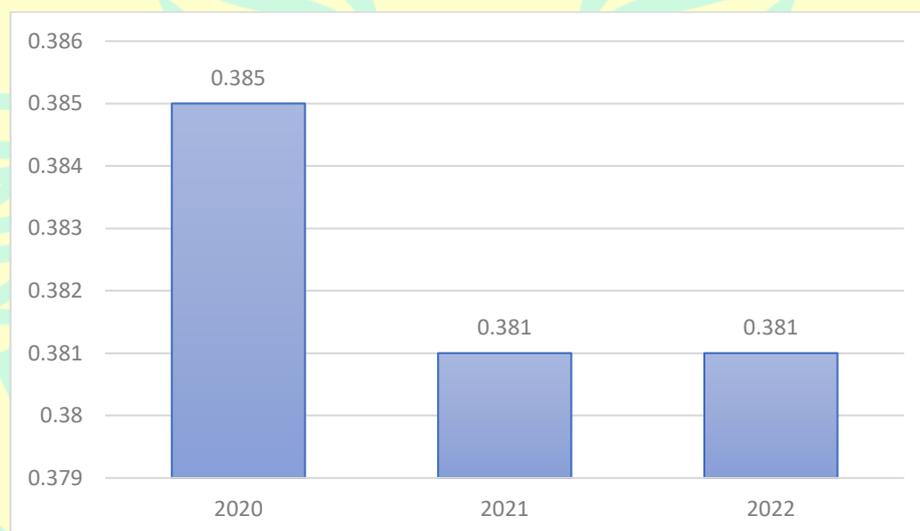


**Gambar 1.1 Tertiary School Enrollment of ASEAN (dalam persen)**

Sumber : The Global Economy, Katadata, dan BPS, diolah oleh penulis

Faktanya menurut Direktur Jendral pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Prof Nizam (Plt.), saat ini APK PT di Indonesia berada angka 31%. Sementara APK yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 37%. Data persentase tersebut dibuktikan pula dengan dengan hasil yang dimuat Badan Pusat Statistik (BPS). Data APK memperlihatkan bahwa APK PT mendapatkan hasil yang paling rendah dan terjadi penurunan yang signifikan dari jenjang lainnya. Bahkan terjadi penurunan APK PT dari tahun 2021 ke tahun 2022 pada angka 31,19% turun ke angka 31,16%.

Nilai APK pada PT di Indonesia tersebut sangat dibawah nilai negara ASEAN lain, seperti Singapura yang pada tahun 2020 sudah berada diangka 91%. Kemudian Thailand berada diangka 49%, serta Malaysia yang berada diangka 43% (Saefuddin, 2022). APK PT yang rendah tersebut, belum memenuhi target dari pemerintah, bahkan mengalami penurunan pada tahun 2022, disebabkan oleh sejumlah alasan. Beberapa alasan yang mungkin berpengaruh yaitu masih terjadinya kesenjangan atau perbedaan gini rasio, jumlah perguruan tinggi, dan dosen antara pulau, kabupaten, serta wilayah di Indonesia.



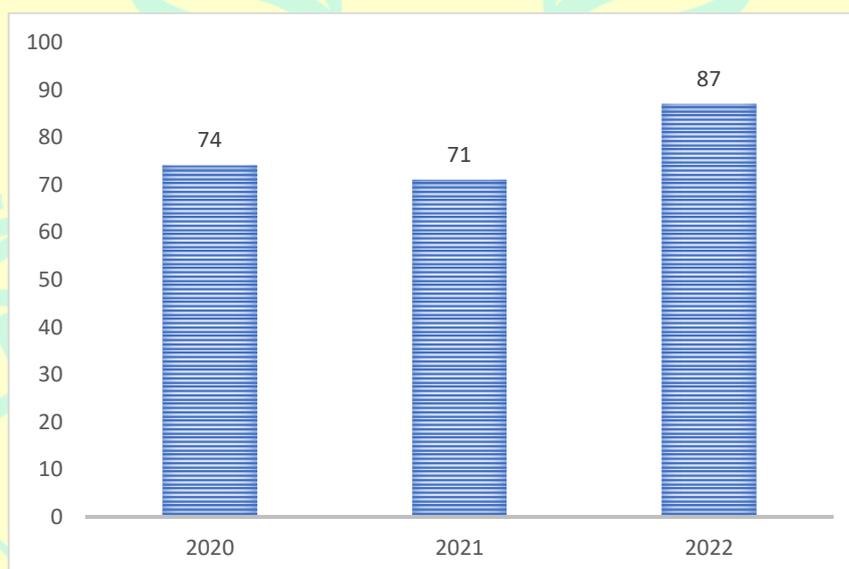
**Gambar 1.2 Grafik Rasio Gini di Indonesia**

Sumber : BPS, diolah oleh penulis

Data pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa Rasio Gini mengalami penurunan pada tahun 2020 ke 2021. Kemudian, mengalami stagnan atau tidak terjadi perubahan pada tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan sebanyak 0.004 poin. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, seperti perbedaan pengeluaran,

kebijakan pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Rasio Gini yang berfluktuatif pula mencerminkan perubahan tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran atau kekayaan di dalam suatu populasi.

Perbedaan akses modal yang didapatkan oleh suatu wilayah menyebabkan hasil Pembangunan yang berbeda-beda. Sulitnya akses modal yang didapatkan akan memengaruhi produktivitas sehingga menyebabkan perbedaan dalam pengeluaran (Maulana & Julia, 2019). Menurut Michael & Smith (2015), modal manusia dengan tingkat pendidikan tinggi akan mengurangi ketimpangan pengeluaran.

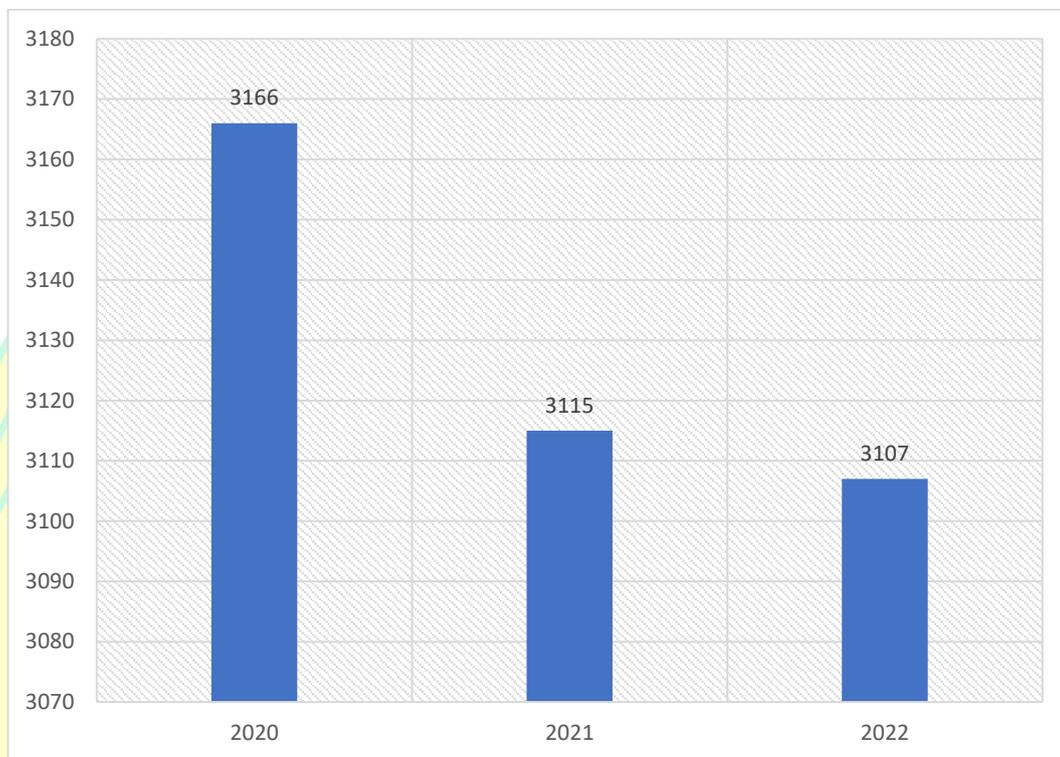


**Gambar 1.3 Grafik Rasio Dosen di Indonesia**

Sumber : Statistik Perguruan Tinggi, PDDikti (diolah oleh peneliti)

Kemudian, seperti yang ditunjukkan oleh data di atas, dari 2020 hingga 2022 terus terjadi fluktuasi pada rasio dosen pada perguruan tinggi di bawah kemendikbud. Terlebih terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2021 ke tahun 2022. Peningkatan tersebut dapat diartikan bahwa pada setiap lembaga

pendidikan tinggi terdapat 87 dosen. Hal tersebut, dapat meningkatkan penurukan beban jumlah peserta didik pada setiap dosen.

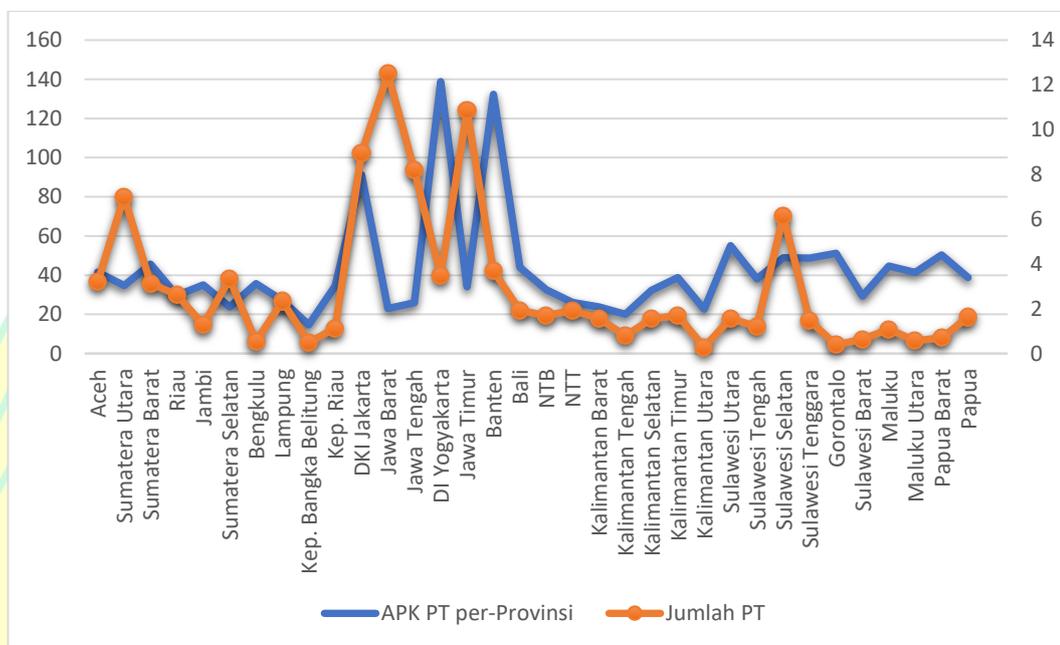


**Gambar 1.4 Grafik Jumlah PT di Indonesia**

Sumber : Statistik Perguruan Tinggi, PDDikti (diolah oleh peneliti)

Kemudian, untuk jumlah perguruan kemendikbud di Indonesia terlihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan sebanyak 51 PT. Hal tersebut, diakibatkan efek pandemi yang menyebabkan pengurangan dan penutupan pada berbagai lembaga pendidikan tinggi seperti pada PTS (Perguruan Tinggi Swasta), PTA (Perguruan Tinggi Agama), dan PTKL (Perguruan Tinggi Kedinasan dan Luar Negeri). Sedangkan, pada tahun 2021 ke 2022 kembali terjadi penurunan jumlah PT sebanyak 8 PT. Jika angka partisipasi dipengaruhi oleh jumlah sekolah setempat, maka intervensi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan (Handa,

2002). Hal tersebut pula harus diteliti lebih lanjut apakah memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap APK PT pada setiap tahunnya.



**Gambar 1.5 Grafik APK PT dan Persentase Jumlah PT per Provinsi tahun 2022**

Sumber: BPS 2022, diolah oleh peneliti

Pada grafik 1.5, terlihat APK PT dengan nilai tertinggi terjadi tahun 2022 terdapat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 138.81% dengan jumlah PT sebanyak 3.5%. Sedangkan provinsi dengan APK PT terendah berada di Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai persentase hanya 14.69% dengan jumlah PT sebanyak 0.5%. Begitu pula pada provinsi Kalimantan Utara, jumlah PT hanya sebanyak 0.31% dengan nilai APK sebesar 0.28%.

Hal tersebut dapat memperlihatkan bahwa jumlah PT dapat menyebabkan masyarakat sulit mengakses pendidikan ke jenjang tinggi yang memengaruhi rendahnya APK. Tetapi penjelasan tersebut masih belum dapat

menjadi kesimpulan akhir bahwa tingkat APK hanya dipengaruhi oleh jumlah PT. Sebab, pada provinsi Jawa Barat terdapat PT sebanyak 12.5% tetapi nilai APKnya dapat dikategorikan rendah dengan nilai 22.98%.

Beberapa penelitian telah mengangkat topik serupa, Pada penelitian Fatah et al. (2021), didapatkan bahwa nilai rata – rata APK akan menurun seiring perubahan pada jumlah penduduk pada suatu rentang usia dan tingkat pendidikan yang diikuti, yang berarti pada tingkat pendidikan tinggi APK mengalami penurunan paling signifikan. Sedangkan menurut Safira & Wibowo (2021) perkembangan APK selama sembilan tahun terakhir (2011 – 2019) tidak mengalami peningkatan yang signifikan, kenaikan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan pemerintah belum mampu meningkatkan APK secara maksimal. Sementara itu, pada penelitian Naharin et al. (2023) menyatakan bahwa nilai APK tertinggi hanya dimiliki oleh jenjang SD. Kemudian, penelitian tersebut menjelaskan bahwa variable pengeluaran perkapita dan rasio murid – guru berdampak positif dan signifikan pada peningkatan APK.

Rasio gini, juga dikenal sebagai koefisien gini, merupakan salah satu metrik yang paling umum yang dipakai dalam menghitung ambang kesenjangan atau ketidakmerataan (Lutfiani & Yuniasih, 2019). Kemudian, pada teori mutu pendidikan terdiri dari mutu input, proses, dan output. APK termasuk dalam mutu input, karena mutu input terdiri dari input SDM dan sumber daya non manusia. Pada input SDM, perguruan tinggi terdiri dari pimpinan (rektor dan dekan), dosen, karyawan, serta mahasiswa. Pada hal ini, variabel jumlah dosen masuk dalam indikator input SDM. Sedangkan, pada

input sumber daya non manusia terdiri atas perlengkapan, peralatan, infrastruktur, dana, dan lain – lain. Variabel jumlah perguruan tinggi menjadi indikator yang terdapat dalam input sumber daya non manusia (Devi, 2020).

Untuk mencakup semua penduduk yang berpartisipasi pada tingkat pendidikan tinggi, penelitian ini menggunakan data partisipasi PT dari sisi APK. Data pada penelitian ini berasal dari 34 provinsi di Indonesia untuk melengkapi kekurangan data pada penelitian sebelumnya di mana tidak melibatkan provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat. Penelitian terdahulu pula hanya berfokus pada APK jenjang di bawah perguruan tinggi seperti SD, SMP, SMA, atau SMK. Kemudian, variabel penelitian menggunakan angka dalam rasio dan persentase.

Selanjutnya, penelitian terdahulu pula lebih berfokus pada pengaruh tingkat kemiskinan, aksesibilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih mematangkan penelitian terdahulu maka akan diteliti pula pengaruh gini rasio terhadap APK. Karena pada gini rasio menurut BPS Tasikmalaya, adalah suatu ukuran secara lebih menyeluruh yang dapat menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di suatu daerah. Pada Rasio Gini beberapa faktor yang memengaruhi yaitu faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran. Kemudian, pada faktor sosial seperti kesehatan, kesempatan kerja, serta pada faktor geografis seperti tingkat aksesibilitas (Shobrun, 2023).

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan tersebut dan kekosongan literatur yang terjadi, maka penelitian ini ingin membahas “**Pengaruh Rasio Gini Ekonomi, Rasio Dosen, dan Rasio Jumlah Perguruan Tinggi Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2020 - 2022**”. APK dipilih menjadi variable penelitian karena pada tingkat perguruan tinggi mendapatkan nilai terendah jika dibandingkan tingkat pendidikan sebelumnya. Sedangkan, pada variable rasio gini dan rasio perguruan tinggi cenderung mengalami penurunan. Serta, pada variable rasio dosen mengalami fluktuatif pada setiap tahunnya.

#### **4.1. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan untuk mencegah topik pembahasan yang menyimpang dan membuat penelitian lebih fokus, terarah, serta dapat memperoleh tujuan penelitian. Dengan demikian, masalah akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi menjadi :

- 1) Penelitian ini melihat 34 provinsi karena menggunakan data dari tahun 2020 dan sesuai dengan data yang dipublikasi oleh Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
- 2) Penelitian dilakukan terhadap perguruan tinggi (PT) di bawah Kemendikbud, dikarenakan tidak adanya data dari PT di bawah Kemenag.

#### **4.1. Pertanyaan Penelitian**

Sesuai latar belakang dan pembatasan masalah penelitian, menimbulkan pertanyaan yang akan ditelaah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pada tingkat rasio gini ekonomi Indonesia terhadap APK PT?
2. Apakah terdapat pengaruh pada rasio dosen terhadap APK PT?
3. Apakah terdapat pengaruh pada rasio jumlah perguruan tinggi di Indonesia terhadap APK PT?

#### **4.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh hasil terkini, akurat, dan paling sesuai standar penelitian, sehingga fakta yang dihasilkan dianggap valid serta reliabel tentang:

1. Pengaruh tingkat rasio gini terhadap APK PT.
2. Pengaruh tingkat rasio dosen terhadap APK PT.
3. Pengaruh tingkat rasio jumlah perguruan tinggi terhadap APK PT.

#### **4.1. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap bahwa fakta yang dihasilkan dapat memberikan informasi secara teori maupun secara praktis, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap temuan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat dan menyediakan informasi atau referensi bagi semua kalangan khususnya untuk kalangan pendidikan dan pemerintahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap temuan yang didapatkan mampu membantu pemerintah terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek Dikti) untuk mengetahui apakah rasio gini, rasio dosen, dan rasio jumlah PT yang terdapat di Indonesia saat ini berpengaruh terhadap APK PT saat ini. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menjadi sumber atau rujukan saat merencanakan dan mempercepat peningkatan APK PT. Pada akhirnya, target yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penggunaan penelitian ini.

### b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian semacam ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengetahui apa yang menjadi pengaruh terhadap APK PT untuk peningkatan mutu atau kualitas input perguruan tinggi.

### c. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan informasi tentang tingkat APK di perguruan tinggi.